

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN BA.018  
SEMESTER II  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Balai Besar Pengkajian dan  
Pengembangan Teknologi Pertanian**  
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

***Jl. Tentara Pelajar No. 10. Bogor (16114)***

**Jawa Barat**

**Telepon (0251) 8351277 – Faxsimile (0251) 8350928**

**E-mail: [bbp2tp@litbang.deptan.go.id](mailto:bbp2tp@litbang.deptan.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 31 Desember 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA  
NIP. 19680415 199203 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan

B.2 Belanja

B.2.1 Belanja Pegawai

B.2.2 Belanja Barang

B.2.3 Belanja Modal

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.2.3.4 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

B.2.3.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.2.3.6 Belanja Modal Lainnya

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Peralatan dan Mesin

C.2.2 Gedung dan Bangunan

C.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

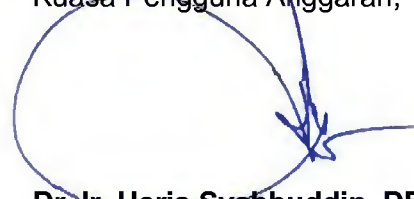
- C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.3 Piutang Jangka Panjang
  - C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
  - C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.4 Aset Lainnya
  - C.4.1 Aset Lain-lain
  - C.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.5 Kewajiban Jangka Pendek
  - C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.6 Ekuitas
  - C.6.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2 Beban Pegawai
  - D.3 Beban Persediaan
  - D.4 Beban Barang dan Jasa
  - D.5 Beban Pemeliharaan
  - D.6 Beban Perjalanan Dinas
  - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
  - D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
  - D.9 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1 Ekuitas Awal
  - E.2 Surplus/Defisit-LO
  - E.3 Penyesuaian Nilai Aset
  - E.4 Transaksi Antar Entitas
  - E.5 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
  - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2 Pengungkapan Lain-lain

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, circular loop followed by several vertical and horizontal strokes, positioned over the text of the signature.

**Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA**  
NIP. 19680415 199203 1 001

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **I Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp128.415.000,00 atau mencapai 755.38% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp17.000.000,00

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp28.662.967.711,00 atau mencapai 93.94% dari alokasi anggaran sebesar Rp31.513.187.000,00.

### **II Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp17.065.997.137,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp389.522.600,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.676.474.537,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban yaitu berupa pendapatan di terima dimuka dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp47.621.000,00 dan Rp17.018.376.137,00 dengan jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp17.065.997.137,00.

### **III Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp80.794.000,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp28.485.565.422,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-28.404.771.422,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-15.166.552,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-28.419.937.974,00.

### **IV Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp13.589.137.768,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-28.419.937.974,00 kemudian dikurangi dengan koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai

Rp4.285.683.238,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27.563.556.105,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp17.018.439.137,00 dan terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp-3.429.301.369,00.

#### **V Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

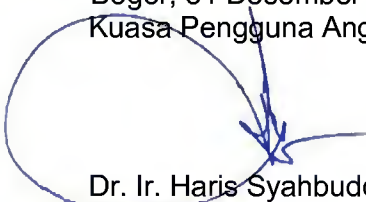
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>					
PNBP	B.1.1	17.000.000	128.415.000	755,38%	56.772.184	334,0%
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>17.000.000</b>	<b>128.415.000</b>	<b>755,38%</b>	<b>56.772.184</b>	<b>334,0%</b>
<b>Belanja</b>	<b>B.2</b>					
<b>Belanja Operasi</b>						
Belanja Pegawai	B.2.1	9.039.367.000	8.129.162.625	89,93%	8.200.627.176	90,0%
Belanja Barang	B.2.2	19.335.258.000	18.551.623.786	95,95%	14.938.539.083	90,2%
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>28.374.625.000</b>	<b>26.680.786.411</b>	<b>94,03%</b>	<b>23.139.166.259</b>	<b>90,1%</b>
<b>Belanja Modal</b>						
Belanja M. Alsin	B.2.3	1.384.062.000	1.287.648.800	93,03%	1.975.691.500	92,7%
Belanja M. JJ					197.111.000	99,5%
Belanja M. Gd & ba	B.2.4	544.500.000	485.200.000	89,11%		
Belanja Penambah	B.2.5	185.000.000	184.340.000	99,64%		
Belanja M. Lainnya	B.2.6	25.000.000	24.992.500	99,97%	29.985.000	100,0%
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>2.138.562.000</b>	<b>1.982.181.300</b>	<b>92,69%</b>	<b>2.202.787.500</b>	<b>93,3%</b>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>30.513.187.000</b>	<b>28.662.967.711</b>	<b>93,94%</b>	<b>25.341.953.759</b>	<b>90,4%</b>

Bogor, 31 Desember 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran,

  
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA  
NIP. 19680415 199203 1 001

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



**II. NERACA**

**Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian  
NERACA**

**PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas Di Bendahara Pengeluaran	C.1.0	0,00	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	-	39.357.781,00
Persediaan	C.1.4	389.522.600,00	2.589.500,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>389.522.600,00</b>	<b>41.947.281,00</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2.1	13.060.096.131,00	12.668.347.331,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2	13.222.624.000,00	10.956.768.273,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	1.120.892.300,00	967.757.300,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	324.157.790,00	299.165.290,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5	-10.113.894.246,00	-8.941.275.103,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.5	-166.889.440,00	-1.760.539.531,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.5	-770.511.998,00	-603.675.292,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>16.676.474.537,00</b>	<b>13.586.548.268,00</b>
<b>Piutang Jangka Panjang</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	C.3.1	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.3.2	0	0
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain	C.4.1	45.200.000,00	45.200.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.2	-45.200.000,00	-45.200.000,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>17.065.997.137,00</b>	<b>13.628.495.549,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	0	39.357.781,00
Pendapatan di terima dimuka		47.621.000,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>47.621.000,00</b>	<b>39.357.781,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>47.621.000,00</b>	<b>39.357.781,00</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.6.1	17.018.376.137,00	13.589.137.768,00
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>17.018.376.137,00</b>	<b>13.589.137.768,00</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>17.065.997.137,00</b>	<b>13.628.495.549,00</b>

Bogor, 31 Desember 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA  
NIP. 19680415 199203 1 001

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	80.794.000,00	43.453.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>80.794.000,00</b>	<b>43.453.000,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	8.129.162.625,00	8.200.627.176
Beban Persediaan	D.3	2.137.037.115,00	1.718.846.182
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.095.319.826,00	4.724.972.794
Beban Pemeliharaan	D.5	1.694.536.753,00	1.152.600.462
Beban Perjalanan Dinas	D.6	7.222.630.440,00	7.414.816.272
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.206.941.663,00	1.376.652.625
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0,00	(18.000)
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>28.485.628.422,00</b>	<b>24.588.497.511,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>-28.404.834.422,00</b>	<b>-24.545.044.511,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	234.152.598,00	42.004.961
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	249.319.150,00	3.730.850
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-15.166.552,00</b>	<b>38.274.111,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>-28.420.000.974,00</b>	<b>-24.506.770.400,00</b>

Bogor, 31 Desember 2017  
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA  
 NIP. 19680415 199203 1 001

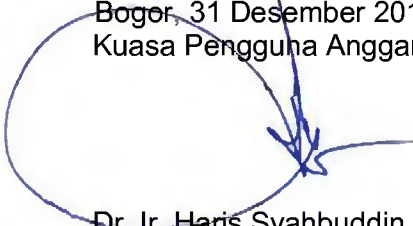
**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31-Des-17	31-Des-16
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	13.589.137.768,00	12.910.597.237,00
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	-28.420.000.974,00	-24.506.770.400,00
<b>PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN</b>			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3	0,00	-40.079.836,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3	4.285.683.238,00	
Transaksi Antar Entitas	E.4	27.563.556.105,00	25.225.390.767,00
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>3.429.238.369,00</b>	<b>678.540.531,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>17.018.376.137,00</b>	<b>13.589.137.768,00</b>

Bogor, 31 Desember 2017  
Kuasa Pengguna Anggaran,

  
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA  
NIP. 19680415 199203 1 001

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

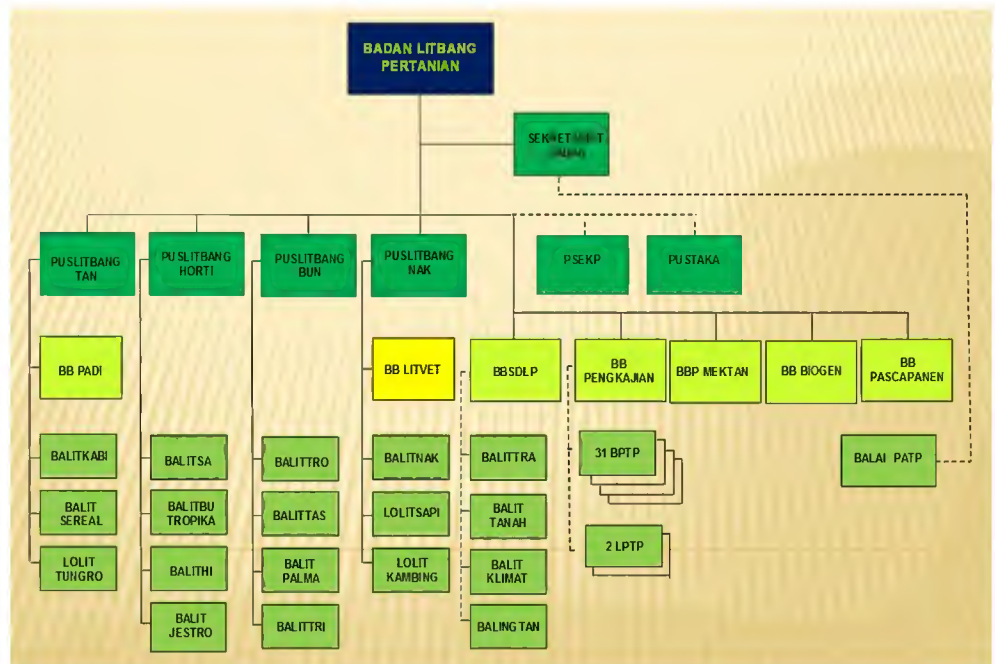
## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Balai Besar Pengkajian dan Teknologi Pertanian atau lebih dikenal sebagai BB Pengkajian merupakan salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 301/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2TP.

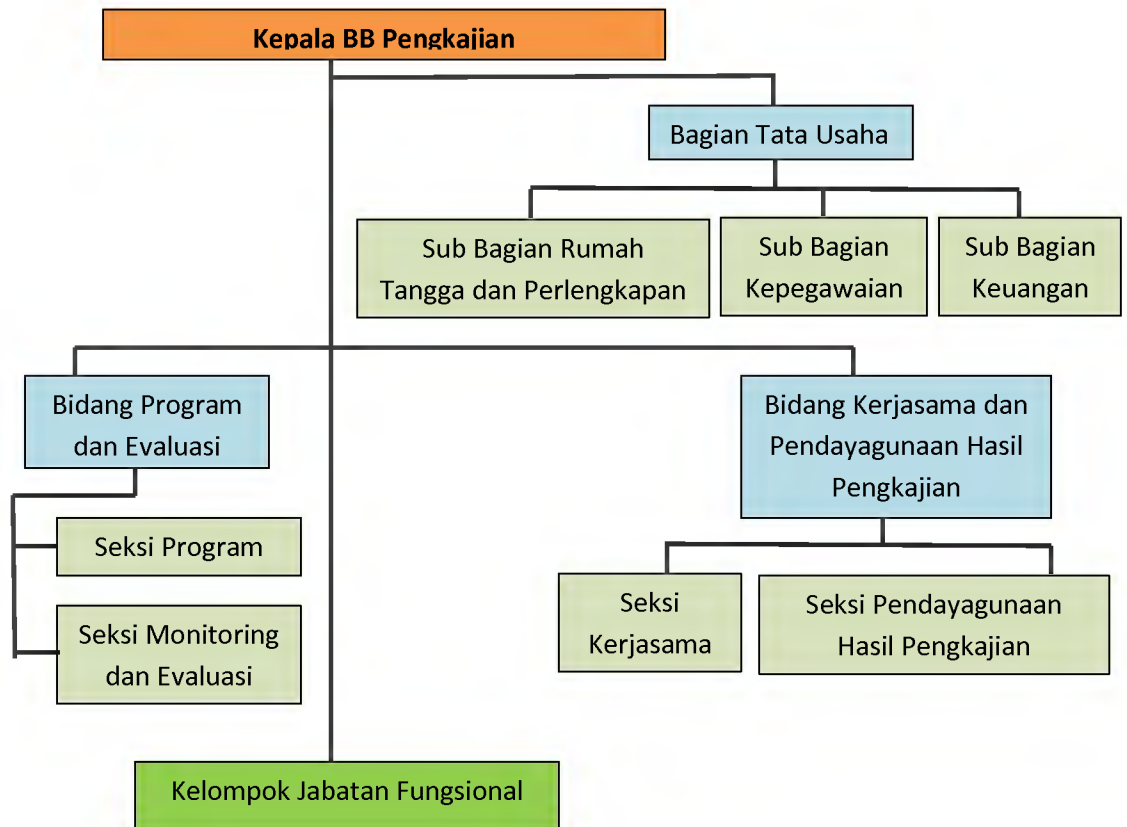
Selain tugas utama tersebut, Kepala Badan Litbang Pertanian juga memberikan mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh BPTP serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Litbang Pertanian. Fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap BPTP dilaksanakan oleh BB Pengkajian dengan memanfaatkan jaringan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga litbang lainnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

## STRUKTUR ORGANISASI & SDM

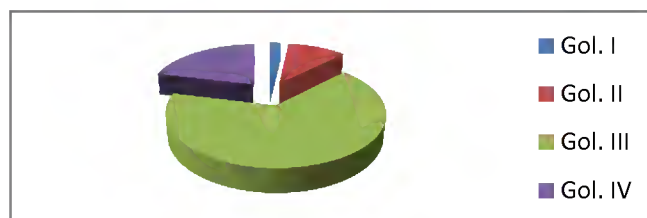
Struktur organisasi BB Pengkajian diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Pimpinan tertinggi adalah Kepala Balai Besar Pengkajian membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Kasubbag Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan. Kepala Bidang Program dan Evaluasi membawahi Kasie Program dan Kasie Monitoring dan Evaluasi. Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Pengkajian membawahi Kasie Kerjasama dan Kasie Pendayagunaan Hasil Pengkajian. Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung dibawah Kepala BB Pengkajian.



Gambar 2. Struktur Organisasi BB Pengkajian

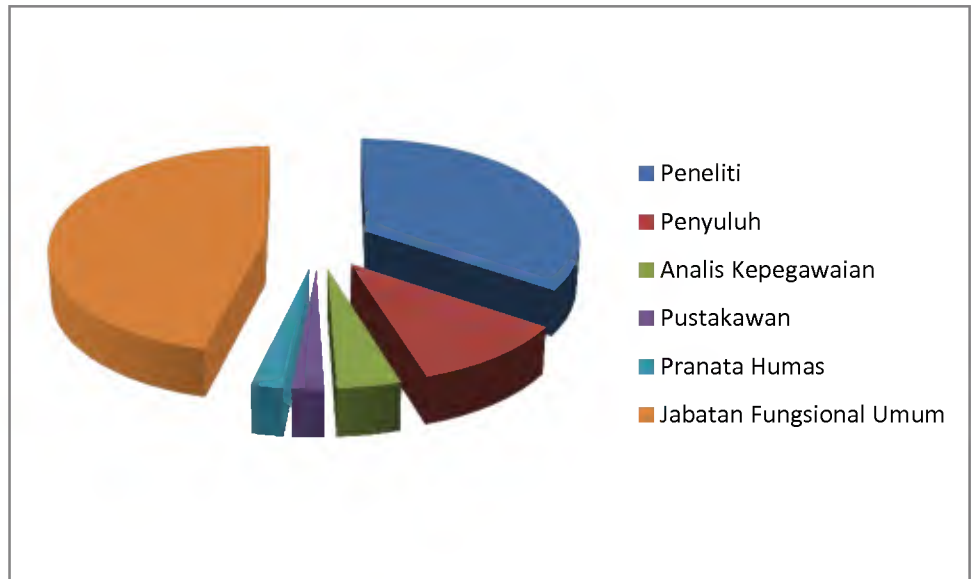
## SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan potensi yang utama untuk mendukung suatu organisasi sesuai dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Jumlah pegawai BB Pengkajian per 31 Desember 2017 sebanyak 104 orang dengan keragaan berdasarkan kepangkatan dan golongan yaitu :



Golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 11 orang, golongan III sebanyak 69 orang dan golongan IV sebanyak 22 orang. Berdasarkan kelompok jabatan fungsional pegawai BB Pengkajian per 31 Desember 2017 terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
Eselon II	1
Eselon III	3
Eselon IV	7
<b>1. Peneliti</b>	<b>32</b>
- Peneliti Utama	6
- Peneliti Madya	7
- Peneliti Muda	13
- Peneliti Pertama	6
<b>2. Penyuluh</b>	<b>10</b>
- Penyuluh Utama	1
- Penyuluh Madya	2
- Penyuluh Muda	5
- Penyuluh Pertama	2
<b>3. Analis Kepegawaian</b>	<b>4</b>
- Analis Kepegawaian Madya	1
- Analis Kepegawaian Muda	2
- Analis Kepegawaian Pelaksana	1
<b>4. Pustakawan</b>	<b>2</b>
- Pustakawan Penyelia	1
- Pustakawan Pelaksana	1
<b>5. Pranata Humas</b>	<b>2</b>
- Pranata Humas Muda	1
- Pranata Humas Pertama	1
<b>6. Jabatan Fungsional Umum</b>	<b>43</b>
<b>Jumlah</b>	<b>104</b>



Komposisi jabatan fungsional di BB Pengkajian didominasi oleh jabatan fungsional umum yaitu 43 orang yang terdiri dari tenaga administrasi pendukung yang terdistribusi pada bidang atau bagian yang menangani urusan pada kegiatan program dan penganggaran, kerjasama penelitian dan pengkajian, diseminasi, teknologi informasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

#### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BB PENGKAJIAN

Balai Besar Pengkajian secara hierarkis merupakan *Bussiness Unit* Badan Litbang Pertanian untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai pembangunan pertanian dan perdesaan sehingga menjadi akselerator pembangunan pertanian dan perdesaan. Berdasarkan hal tersebut :

#### **Visi Balai Besar Pengkajian :**

“Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan”

#### **Misi Balai Besar Pengkajian :**

1. Merakit, menguji dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri
2. Mendiseminasikan inovasi pertanian tropika unggul dalam rangka peningkatan *scientific recognition* dan *impact recognition*.\

### Tujuan Balai Besar Pengkajian :

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri berbasis *advanced technology* dan *bioscience*, aplikasi IT dan adaptif terhadap dinamika iklim;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian nasional

### Sasaran Operasional Balai Besar Pengkajian :

1. Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi
2. Terdiseminasiannya inovasi pertanian teknologi pertanian bioindustri spesifik lokasi
3. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung desentralisasi rencana aksi.



## RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Balitbangtan merupakan salah satu unit eselon satu dibawah Kementerian Pertanian, sehingga arah kebijakan Balitbangtan terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan Pertanian. Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, maka pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi mendukung ketahanan nasional. Secara lengkap arah kebijakan pembangunan pertanian dalam RPJMN 2015-2019 itu antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian.
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian.
3. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya pertanian.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
5. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Sementara itu memperhatikan arah, visi, misi, dan sasaran utama pembangunan pertanian dalam SIPP 2015-2045, pembangunan pertanian ke depan diarahkan untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, dan penempatan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Visi pembangunan pertanian 2015-2045 adalah **“terwujudnya sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi dari sumberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang terkait erat dengan tupoksi Balitbangtan adalah:

1. Mengembangkan sistem usahatani pertanian tropika agroekologi yang berkelanjutan dan terpadu dengan bioindustri melalui



- perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya genetik, serta perluasan, pengembangan dan konservasi lahan pertanian;
2. Mengembangkan kegiatan ekonomi input produksi, informasi, dan teknologi dalam Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan melalui perlindungan dan pemberdayaan insan pertanian dan perdesaan;
  3. Membangun sistem pengolahan pertanian melalui perluasan dan pendalaman pasca panen, agro-energi dan bioindustri berbasis perdesaan guna menumbuhkan nilai tambah;
  4. Mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi.

Merujuk pada Dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019, visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya system pangan pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Sedangkan misinya adalah mewujudkan system pertanian bioindustri berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.

Visi dan misi Kementerian pertanian tersebut dijabarkan dalam Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019 yaitu:

1. Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi

#### **Arah Kebijakan Pengkajian dan Diseminasi Teknologi Inovasi Spesifik Lokasi**

Arah kebijakan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi spesifik lokasi 2015-2019 harus mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pertanian Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan pertanian yang tertuang dalam SIPP 2015-2045, serta arah kebijakan litbang pertanian. Berdasarkan kebijakan litbang pertanian untuk pengembangan nilai tambah kegiatan pertanian melalui penerapan konsep pertanian bio-industri, maka arah kebijakan pengkajian dan diseminasi teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi adalah mengembangkan sistem pengkajian dan diseminasi mendukung pertanian bioindustri berbasis sumberdaya lokal, sesuai dengan **Program Badan Litbang Pertanian 2015-2019 : penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan.**

Secara rinci arah kebijakan Pengembangan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi ke depan adalah :

1. Mengembangkan kegiatan pengkajian dan diseminasi mendukung peningkatan produksi hasil pertanian wilayah, sebagai upaya percepatan penerapan swasembada pangan nasional.
2. Mendorong pengembangan dan penerapan *advance technology* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya lokal sepsifik lokasi, yang jumlahnya semakin terbatas.
3. Mendorong terciptanya suasana keilmuan dan kehidupan ilmiah yang kondusif sehingga memungkinkan optimalisasi sumberdaya

manusia dalam pengembangan kapasitasnya dalam melakukan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi.

4. Mendukung terciptanya kerjasama dan sinergi yang saling menguatkan antara UK/UPT lingkup Balitbangtan dengan berbagai lembaga terkait, terutama dengan stakeholder di daerah.

Adapun sasaran pengembangan pengkajian dan diseminasi teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi yang akan dicapai pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya inovasi pertanian spesifik lokasi mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan
2. Terdesiminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi, serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi
3. Tersedianya model-model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi
4. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi
5. Terbangunnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Dalam rangka peningkatan dukungan inovasi dan teknologi sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019, maka upaya yang harus dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas peneliti di bidang pertanian
2. Meningkatkan penelitian yang memanfaatkan teknologi terkini dalam rangka mencari terobosan peningkatan produktivitas benih/bibit/tanaman/ternak
3. Memperluas cakupan penelitian mulai dari input produksi, efektivitas lahan, teknik budidaya, teknik pasca panen, tehnik pengolahan hingga teknik pengemasan dan pemasaran.
4. Meningkatkan diseminasi teknologi kepada petani secara luas
5. Membina petani maju sebagai patron dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru di tingkat lapangan.

### **Strategi**

Uraian pada bagian ini mengemukakan berbagai strategi yang dikembangkan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Prinsip dasar dari strategi ini adalah untuk terjadinya percepatan dalam pencapaian sasaran strategis, atau strategi ini menggambarkan upaya *unusual* yang perlu dikembangkan dalam pencapaian sasaran strategis.

### **Sasaran 1 : Tersedianya inovasi pertanian unggul spesifik lokasi**

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui penyempurnaan sistem dan perbaikan fokus kegiatan pengkajian yang didasarkan pada kebutuhan pengguna (petani dan pelaku usaha agribisnis lainnya) dan potensi sumberdaya wilayah. Penyempurnaan sistem pengkajian mencakup metode pelaksanaan pengkajian serta monitoring dan evaluasi. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu: Pengkajian inovasi pertanian spesifik lokasi.

**Sasaran 2 : Terdesiminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi**

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan kuantitas dan atau kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu: Penyediaan dan penyebarluasan inovasi pertanian.

**Sasaran 3 : Tersedianya model-model pengembangan inovasi pertanian bioindustri spesifik lokasi**

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan efektivitas kegiatan tematik di BPTP yang disinergikan dengan UK/UPT lingkup Balitbangtan, terutama dalam menerapkan hasil-hasil litbang pertanian dalam super impose model pertanian bio-industri berbasis sumberdaya lokal.

**Sasaran 4 : Rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi**

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan kajian-kajian tematik terhadap berbagai isu dan permasalahan pembangunan pertanian baik bersifat responsif terhadap dinamika kebijakan dan lingkungan strategis maupun antisipatif terhadap pandangan futuristik kondisi pertanian pada masa mendatang. Strategi ini diwujudkan ke dalam satu sub kegiatan yaitu: analisis kebijakan mendukung empat sukses Kementerian Pertanian.

**Sasaran 5 : Terbangunnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi**

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui peningkatan efektivitas manajemen institusi. Strategi ini diwujudkan ke dalam delapan sub kegiatan yaitu:

1. Penguatan kegiatan pendampingan model diseminasi dan program strategis kementan serta program strategis Badan Litbang Pertanian
2. Penguatan manajemen mencakup perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi institusi
3. Pengembangan kompetensi SDM
4. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui penerapan ISO 9001:2008
5. Peningkatan pengelolaan laboratorium
6. Peningkatan pengelolaan kebun percobaan
7. Peningkatan kapasitas instalasi UPBS
8. Jumlah publikasi nasional dan internasional
9. Peningkatan pengelolaan *data base* dan *website*.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pengkajian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Balai Besar Pengkajian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pengkajian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan Balai Besar Pengkajian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian adalah sebagai berikut:

## *Pendapatan-LRA*

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

## *Penyusutan Aset Tetap*

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10



Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017 dalam menjalankan tupoksinya Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian didukung oleh sumber dana yang berasal dari dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) melalui DIPA Nomor DIPA-018.09.2.648673/2016. Selama periode berjalan, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian telah mengadakan tiga kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dan tiga kali revisi POK. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Revisi DIPA pertama tanggal 16 Mei 2017 dilakukan karena adanya pengalihan anggaran pada satker Balai Besar Pengkajian untuk kegiatan Gerakan Tanam Cabai pada seluruh BPTP, Revisi DIPA kedua tanggal 21 Juli 2017 dilakukan karena adanya perubahan akun pada kegiatan Pembangunan Taman Sains Pertanian dari belanja modal gedung dan bangunan (533111) ke belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (523111), Revisi DIPA ketiga tanggal 16 Agustus 2017 karena adanya penambahan anggaran APBNP untuk kegiatan perbenihan, Revisi DIPA ke empat tanggal 7 Nopember 2017 karena Efisiensi belanja dan pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja bahan dan perjalanan; Revisi DIPA ke lima tanggal 30 Nopember 2017 karena Pergeseran pagu anggaran untuk pemenuhan dan Penyesuaian pagu anggaran untuk menutupi kekuarangan gaji dan tunjangan di BPTP; Revisi DIPA ke enam tanggal 13 Desember 2017 karena adanya pergeseran anggaran ke belanja perjalanan dan revisi DIPA ke tujuh tanggal 29 Desember 2017 karena pergeseran anggaran yang disebabkan pagu minus.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	10.342.548.000,00	9.039.367.000,00
Belanja Barang	16.707.500.000,00	19.335.258.000,00
Belanja Modal	1.849.500.000,00	2.138.562.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>28.899.548.000,00</b>	<b>30.513.187.000,00</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp128.415.000,00

## B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp128.415.000,00 atau mencapai 755.38% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0	92.515.000,00	0%
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing2 KL	17.000.000	35.900.000,00	47,4%
<b>Jumlah</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>128.415.000,00</b>	<b>755,38%</b>

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 126.19%. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut :

### Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31-12-2017	Realisasi 31-12-2016	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	92.515.000,00	1.053.000,00	8685,8%
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing2 KL	35.900.000,00	15.750.000,00	127,9%
Pendapatan Jasa	0,00	26.650.000,00	-100,0%
Pendapatan Lain-lain	0,00	13.319.184,00	-100,0%
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	0		0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>128.415.000,00</b>	<b>56.772.184,00</b>	<b>126,19%</b>

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 126.19% disebabkan pada tahun 2017 terdapat pendapatan dari pengelolaan BMN berupa sewa tanah bangunan perkantoran untuk ATM BNI dan BRI .

Realisasi pendapatan pada 31 Desember 2017 yaitu:

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN sebesar Rp92.515.000,00. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 8685.8%, disebabkan oleh adanya sewa tanah bangunan perkantoran untuk ATM BNI sebesar Rp45.198.000,00 sesuai perjanjian pinjam pakai nomor BGR/01/001/PKS/2017, ATM BRI sebesar Rp45.000.000,00 selama tiga tahun dan sewa ruangan untuk

- kantor sebesar Rp.2.317.000;
2. Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian lembaga sebesar Rp35.900.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan sewa rumah tamu (*guest house*) yang mengalami perubahan kode akun berdasarkan PP tarif nomor 35 tahun 2016.

*Realisasi Belanja  
Negara  
Rp15.565.313.653*

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp28.662.9647.711,00 atau 93.94% dari anggaran belanja sebesar Rp30.513.187.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2017

Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	9.039.367.000	8.129.162.625	89,9
Belanja Barang	19.335.258.000	18.551.623.786	95,9
Belanja Modal	2.138.562.000	1.982.181.300	92,7
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>30.513.187.000</b>	<b>28.662.967.711</b>	<b>93,9</b>
Pengembalian Belanja			
<b>Total Belanja</b>	<b>30.513.187.000</b>	<b>28.662.967.711</b>	<b>93,9</b>

### Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31-12-2017	Realisasi 31-12-2016	.%
Belanja Pegawai	8.129.162.625,00	8.200.627.176,00	-0,87%
Belanja Barang	18.551.623.786,00	14.938.539.083,00	24,19%
Belanja Modal	1.982.181.300,00	2.202.787.500,00	-10,01%
<b>Total Belanja</b>	<b>28.662.967.711,00</b>	<b>25.341.953.759,00</b>	<b>13,10%</b>

### Perbandingan Pagu Anggaran Belanja TA 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran	Anggaran	.%
	31-Des-17	31-Des-16	
Belanja Pegawai	9.039.367.000,00	9.111.852.000,00	-0,80%
Belanja Barang	19.335.258.000,00	16.568.153.000,00	16,70%
Belanja Modal	2.138.562.000,00	2.360.440.000,00	-9,40%
<b>Total Belanja</b>	<b>30.513.187.000,00</b>	<b>28.040.445.000,00</b>	<b>8,82%</b>

Dibandingkan dengan 31 Desember 2016, Realisasi Belanja 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 13.10% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan Realisasi Belanja Pegawai sebesar 0.87 % disebabkan adanya 3 orang pegawai yang pensiun dan 1 orang mutasi.
2. Kenaikan Realisasi Belanja Barang sebesar 24.19% kegiatan pada

tahun 2017 karena kegiatan berkurang sementara pagu anggaran bertambah sehingga kegiatan untuk belanja barang di tahun anggaran 2017 dapat terealisasi secara optimal.

3. Penurunan Belanja Modal sebesar 10.01 % disebabkan rendahnya harga pada saat penwaran dibandingkan dengan harga HPS sehingga terjadi efisiensi pada belanja modal di tahun 2017. Belanja modal yang sudah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2017 adalah pengadaan belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaan alat pengolah data, pengadaan alat studio dan komunikasi dan pengadaan perlengkapan sarana gedung; belanja modal gedung dan bangunan yaitu pembangunan gapura kawasan TSP; belanja penambahan nilai gedung dan bangunan yaitu renovasi sekretariat dan showroom serta renovasi gazebo.

*Belanja Pegawai*  
Rp8.129.162.625

### **B.2.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.129.162.625,00 dan Rp8.200.627.176,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah terlaksana kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan belanja modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar 0.87%. Hal ini disebabkan karena adanya 3 orang pegawai yang pensiun dan 1 orang mutasi pada tahun 2017.

#### *Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 2016*

Uraian	Realisasi 31-12-2017	Realisasi 31-Des-2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.021.940.145,00	8.118.695.919,00	-1,19%
Belanja Lembur	107.593.000,00	107.284.000,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>8.129.533.145,00</b>	<b>8.225.979.919,00</b>	<b>-1,17%</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-370.520,00	-25.352.743,00	-98,54%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.129.162.625,00</b>	<b>8.200.627.176,00</b>	<b>-0,87%</b>

Jumlah pegawai Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No	Golongan	Jumlah PNS	Istri/Suami	Anak	Jumlah
1	I	2	2	4	8
2	II	11	10	16	37
3	III	68	48	70	186
4	IV	23	17	16	56
Jumlah		104	78	163	287

## **B.2.2 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18.551.623.786,00 dan Rp14.938.539.083,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 24.19 % dari TA 2016. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan pagu anggaran pada tahun 2017 yaitu sebesar 16.70 % dan kegiatan di tahun 2017 lebih sedikit dibanding tahun 2016 sehingga kegiatan lebih terealisasi secara optimal.

Kenaikan realisasi belanja barang di tahun 2017 antara lain :

- a. Kenaikan belanja barang operasional sebesar 24.64% karena adanya kenaikan anggaran pada belanja keperluan perkantoran yaitu biaya langganan internet dan langganan media online untuk mengakomodir penyebaran diseminasi melalui media sosial sehingga menyebabkan realisasi belanja barang operasional tahun 2017 meningkat. Belanja barang operasional meliputi keperluan sehari-hari perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengadaan pakaian dinas, honor operasional pengelola anggaran, honor petugas kebersihan dan pramubakti, satpam dan pengemudi, honor dokter dan tenaga kontrak.
- b. Kenaikan belanja barang non operasional sebesar 63.72% karena adanya pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja bahan terutama belanja bahan konsumsi untuk mengakomodir kegiatan yang dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan kegiatan di lapang. Belanja barang non operasional meliputi belanja bahan, belanja honor output kegiatan, dan belanja barang non operasional lainnya berupa bahan pendukung kegiatan.
- c. Kenaikan belanja barang persediaan sebesar 38.79% karena adanya kenaikan pada pagu anggaran untuk mengakomodir keperluan barang konsumsi berupa ATK, komputer supplies dan bahan cetakan untuk publikasi penyebaran diseminasi melalui buletin, jurnal, prosiding dan poster. Belanja barang persediaan yang meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan bahan baku.
- d. Kenaikan belanja jasa sebesar 52.80% karena adanya kegiatan yang melibatkan jasa konsultan yaitu berupa desain infografis buku TSP dan pengembangan website kegiatan TSP, selain itu bertambahnya anggaran pada belanja jasa terutama jasa profesi untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang membutuhkan jasa narasumber sehingga menyebabkan realisasi belanja jasa menjadi tinggi. Belanja jasa meliputi jasa konsultan, jasa profesi, belanja sewa, langganan daya dan jasa.
- e. Kenaikan belanja pemeliharaan sebesar 38.75% disebabkan kenaikan pada pagu anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan dan pemeliharaan peralatan dan mesin karena adanya pengelolaan untuk pemeliharaan mess balitbangtan yang anggarannya berada di BBP2TP. Selain itu bertambahnya pagu anggaran untuk mengakomodir pemeliharaan peralatan dan mesin yang disebabkan operasional kendaraan bermotor yang penggunaannya dilakukan terus menerus sehingga diperlukan biaya pemeliharaan yang kontinu. Belanja pemeliharaan

digunakan untuk fasilitas kantor seperti gedung dan bangunan, peralatan dan mesin yang sudah waktunya dilakukan pemeliharaan karena sudah memasuki masa manfaat penggunaan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Penurunan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 2.59% meliputi perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas paket meeting luar kota karena adanya penurunan pagu anggaran pada perjalanan dinas karena kebijakan pemerintah.
- g. Adanya belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada tahun 2017 sebesar Rp. 346.398.400,00 meliputi belanja gedung dan bangunan yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp. 246.102.000,00 yaitu berupa pembuatan rumah pompa, pembuatan bak penampungan air besar dan geomembrane; belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan ke masyarakat sebesar Rp. 30.800.000,00 yaitu berupa pompa sentrifugal dan belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp. 69.496.400,00 berupa pemasangan jaringan listrik 10 KVA dan pemasangan saluran air pipanisasi pengairan.

**Perbandingan Belanja Barang**  
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi	Realisasi	Naik (Turun) %
	31-Des-17	31-Des-16	
Belanja Barang Operasional	1.571.862.000,00	1.261.160.000,00	24,64%
Belanja Barang Non Operasional	3.465.945.303,00	2.117.047.305,00	63,72%
Belanja Barang Persediaan	2.337.029.867,00	1.683.801.555,00	38,79%
Belanja Jasa	2.057.512.523,00	1.346.555.489,00	52,80%
Belanja Pemeliharaan	1.550.245.253,00	1.117.258.462,00	38,75%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.222.630.440,00	7.414.816.272,00	-2,59%
Belanja yang diserahkan ke masyarakat	346.398.400,00		#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>18.551.623.786,00</b>	<b>14.940.639.083,00</b>	<b>24,17%</b>
Pengembalian Belanja Barang		(2.100.000)	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>18.551.623.786,00</b>	<b>14.938.539.083,00</b>	<b>24,19%</b>

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Barang  
TA 2017 dan 2016

Uraian Belanja Barang (52)		Anggaran	Anggaran	Naik
		31-Des-17	31-Des-16	(Turun) %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.405.000.000	1.080.176.000	30,07%
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45.000.000	45.000.000	0,00%
521115	Belanja Honor Operasional Satker	153.600.000	142.500.000	7,79%
521211	Belanja Bahan	2.356.807.000	1.773.433.000	32,90%
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	512.650.000	516.940.000	-0,83%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	845.190.000	35.000.000	2314,83%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.849.580.000	1.738.478.000	63,91%
522111	Belanja Langganan Listrik	36.000.000	321.000.000	-88,79%
522112	Belanja Langganan Telepon	60.000.000	75.000.000	-20,00%
522113	Belanja Langganan Air	42.000.000	54.000.000	-22,22%
522131	Belanja Jasa Konsultan	103.033.000	0	#DM/0!
522141	Belanja Sewa	199.213.000	19.800.000	906,13%
522151	Belanja Jasa Profesi	1.437.200.000	982.900.000	46,22%
522191	Belanja Jasa Lainnya	22.000.000	25.000.000	-12,00%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	669.676.000	344.400.000	94,45%
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	982.194.000	773.726.000	26,94%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	5.088.000.000	6.765.000.000	-24,79%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.200.000	176.100.000	19,36%
524114	Belanja Perjadiin Paket Meeting Dalam Kota	160.400.000	398.600.000	-59,76%
524119	Belanja Perjadiin Paket Meeting Luar Kota	1.845.500.000	1.301.100.000	41,84%
526112	Belanja Alsin utk diserahkan ke masyarakat	30.800.000	0	#DM/0!
526113	Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan ke masyarakat	247.566.000	0	#DM/0!
526114	Belanja JJ untuk diserahkan ke masyarakat	69.649.000	0	#DM/0!
<b>Total Pagu Anggaran Belanja</b>		<b>19.371.258.000</b>	<b>16.568.153.000</b>	<b>16,92%</b>

*Belanja Modal*  
*Rp1.982.181.300*

### **B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.982.181.300,00 dan Rp2.202.787.500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 10.01% dibandingkan 31 Desember 2016 karena harga pada saat penawaran lebih rendah dibandingkan nilai HPS dengan spesifikasi yang sama.



*Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN	REALISASI per 31 Desember 2017	REALISASI per 31 Desember 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.287.648.800	1.975.691.500	(34,83)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.200.000		
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangun	184.340.000		
Belanja Penambahan Nilai Jaringan		197.111.000	0,00
Belanja Modal Lainnya	24.992.500	29.985.000	(16,65)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.982.181.300</b>	<b>2.202.787.500</b>	<b>-10,01</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.982.181.300</b>	<b>2.202.787.500</b>	<b>-10,01</b>

**B.2.3.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada 31 Desember 2017 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan Balai Besar Pengkajian tidak memiliki aset tanah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.287.648.800,00 dan Rp1.975.691.500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 34.83% dibandingkan 31 Desember 2016 dikarenakan kegiatan belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2017 lebih sedikit dibanding tahun 2016.

Belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 meliputi :

- a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar Rp616.000.000,00 sesuai SPK Nomor B-204/PL.010/H.12/1/2017 tanggal 19 Januari 2017;
- b. Pengadaan perlengkapan sarana gedung sebesar Rp. 12.500.000,00 sesuai SPK Nomor 77/INC-CV.SH/08/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
- c. Pengadaan peralatan dan mesin kegiatan TSTPN sebesar Rp.

- 217.085.000,00 sesuai SPK Nomor B-1556/PL.010/H.12/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- d. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pengembangan tanaman perbenihan sebesar Rp.108.633.800,00 sesuai SPK Nomor B-2025/PL.220/H.12/11/2017 tanggal 30 Nopember 2017;
  - e. Pengadaan kendaraan roda 3 sebesar Rp. 79.730.000,00 sesuai SPK Nomor B-2055.2/PL.010/H.12/11/2017 tanggal 30 Nopember 2017;
  - f. Pengadaan kendaraan roda 2 sebesar Rp. 64.000.000,00 sesuai SPK Nomor B-2049/PL.010/H.12/11/2017 tanggal 29 Nopember 2017; dan
  - g. Pengadaan Kendaraan Roda 4 sebesar Rp. 189.700.000,00 sesuai SPK Nomor B-2091.1/PL.220/H.12/12/2017 tanggal 5 Desember 2017.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi	Realisasi	Naik (Turun) %
	31-Des-17	31-Des-16	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.287.648.800	1.975.691.500	-34,83%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.287.648.800</b>	<b>1.975.691.500</b>	<b>-34,83%</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.287.648.800</b>	<b>1.975.691.500</b>	<b>-34,83%</b>

**B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp485.200.000,00 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan 100 % dibandingkan Realisasi 31 Desember 2016 karena pada tahun 2017 terdapat belanja modal gedung dan bangunan yaitu berupa pembangunan gapura kawasan TSTPN sebesar Rp433.700.000,00 sesuai SPK Nomor B-1661/PL.010/H.12/11/2017 tanggal 1 Nopember 2017; Jasa Konsultasi Perencana Gapura Kawasan TSTPN sebesar Rp31.000.000,00 sesuai SPK Nomor B-1295.1/PL.010/H.12/8/2017 tanggal 31 Agustus 2017; Jasa Konsultasi Pengawas Gapura Kawasan TSTPN sebesar Rp20.500.000,00 sesuai SPK Nomor B-1666/PL.010/H.12/11/2017 tanggal 1 Nopember 2017.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Gedung	485.200.000	0	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>485.200.000</b>	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>485.200.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

***B.2.3.4 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan***

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2017 dan Per 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp184.340.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 terjadi kenaikan sebesar 100 % per 31 Desember 2017 karena pada tahun 2017 terdapat penambahan nilai gedung dan bangunan yaitu renovasi Gazebo sebesar Rp. 66.000.000,00 sesuai SPK Nomor B-2052/PL.010/H.12/11/2017 tanggal 19 Oktober 2017 dan renovasi sekretariat dan showroom TSP yaitu Aset Tetap Dalam Renovasi karena merupakan gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Puslitbangun sebesar Rp. 118.340.000,00 sesuai SPK Nomor B-2053/PL.010/H.12/11/2017 tanggal 30 Nopember 2017.

*Perbandingan Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan  
Bangunan  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Penambahan Nilai Gedung dan Bangun	184.340.000	0	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>184.340.000</b>	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>184.340.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

***B.2.3.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan***

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2017 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 tidak terdapat alokasi belanja penambahan nilai jaringan pada Balai Besar Pengkajian.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Per 31 Des 2017	REALISASI Per 31 Des 2016	Naik (Turun)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

***B.2.3.6 Belanja Modal Lainnya***

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2017 dan Per 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp24.992.500,00 dan Rp29.985.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 terjadi penurunan per 31 Desember 2017 karena terjadinya penurunan pada jumlah pagu anggaran 2017 sehingga berdampak pada penurunan realisasi belanja modal lainnya.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016*

Keterangan	31-Des-17	31-Des-16
Uang Tunai	-	-
Uang Muka di PPA		
Bank BERSAMA No.acc 0193913600	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar masing-masing Rp0.00 dan Rp0.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp39.357.781,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Keterangan	30/09/2017	31/12/2016
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	39.357.781
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>39.357.781</b>

Piutang PNBP  
Rp0

#### C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Uraian	TH 2017	TH 2016
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0

#### C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

No	Nama	TH 2017	TH 2016
1			
2			
3			
<b>Jumlah</b>			

Bagian Lancar  
TPA  
Rp0

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

No	Nama	30-Sep-17	31-Des-16
1			
2			
3			
<b>Jumlah</b>		-	-

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp 0

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja Dibayar  
di Muka Rp0*

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima Rp0*

### C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Jenis	TH 2017	TH 2016
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan  
Rp389.522.600*

### C.10 Persediaan

Saldo Persediaan per per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp389.522.600,00 dan Rp2.589.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Uraian Persediaan	31-Des-17	31-Des-16
Barang Konsumsi	43.124.200	2.589.500,00
Bahan untuk Pemeliharaan		
Tanah Bangunan utk diserahkan ke masyarakat	246.102.000	
Peralatan dan Mesin utk diserahkan ke masyarakat	30.800.000	
Jalan, Irigasi dan Jaringan utk diserahkan ke masyarakat	69.496.400	
<b>Jumlah</b>	<b>389.522.600</b>	<b>2.589.500,00</b>



### Belanja Barang yang Diserahkan Ke Masyarakat

Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat (526xxx)			
		Pagu	Realisasi
526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan ke masyarakat		
	- Pompa sentrifugal	30.800.000	30.800.000
526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan ke masyarakat		
	- Pembuatan rumah pompa	16.800.000	16.700.000
	- Pembuatan bak penampungan air besar	190.000.000	188.636.000
	- Geomembrane	40.766.000	40.766.000
526114	Belanja barang jalan, irigasi dan jaringan utk diserahkan ke masyarakat		
	- Pemasangan jaringan listrik 10 KVA	36.049.000	35.946.400
	- Pemasangan saluran air pipanisasi pengairan	33.600.000	33.550.000
	<b>Jumlah</b>	<b>348.015.000</b>	<b>346.398.400</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

#### *Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

No	Debitur	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1			
2			
3			
	<b>Jumlah</b>	-	-

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Debitur	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1			
2			
3			
4			
5			
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0*

**C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang  
TA 2017*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		-	-

TanahRp0

#### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian tidak memiliki tanah karena berada di tanah milik satker Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian . Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>0</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

##### Rincian Tanah TA 2016

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			
2			
3			
4			
Jumlah			

Peralatan dan  
Mesin  
Rp13.060.096.131

#### C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp13.060.096.131,00 dan Rp12.668.347.331,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>12.668.347.331,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	1.287.648.800,00
Transfer Masuk	672.960.000,00
Perolehan Lainnya	
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transfer Keluar	-1.568.860.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>13.060.096.131,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-10.113.894.246,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>2.946.201.885,00</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin meliputi pembelian berupa :

- a. LCD projector/Infocus sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp35.766.500,00;
- b. Laptop sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp90.942.500,00;
- c. Printer sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp6.296.400,00;
- d. Printer all in one sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp7.967.300,00;
- e. Scanner sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp49.106.200,00;
- f. PC Unit sebanyak 19 buah dengan nilai sebesar Rp425.921.100,00;
- g. Voice Recorder sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00;
- h. Lemari Arsip Sliding sebanyak 3 buah dengan nilai sebesar Rp10.500.000,00;
- i. Mic Conference sebanyak 14 buah dengan nilai sebesar Rp75.460.000,00;
- j. Audio Conference sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp7.150.000,00;
- k. Power Supply Microphone sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp23.100.000,00;
- l. Kabel Roll 15 Meter sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp935.000,00;
- m. Kabel Roll 5 Meter sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp660.000,00;
- n. Amplifier sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp2.970.000,00;
- o. PC Unit sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp14.850.000,00;
- p. Televisi 49 Inch sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp10.560.000,00;
- q. AC Split 1 Pk sebanyak 5 buah dengan nilai sebesar Rp24.750.000,00;
- r. Meja Rapat sebanyak 15 buah dengan nilai sebesar Rp23.100.000,00;
- s. Kursi Besi sebanyak 30 buah dengan nilai sebesar Rp21.450.000,00;
- t. Sice sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp12.100.000,00;
- u. Laptop 12 inch sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp28.050.000,00;
- v. Laptop XPS 13 Non Touch sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp23.650.000,00;
- w. PC unit sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp40.636.200,00;
- x. Printer sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp1.817.200,00;
- y. Printer sebanyak 1 buah dengan nilai sebesar Rp4.952.200,00;
- z. Scanner sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp9.528.200,00;
- aa. Kendaraan Roda 4 Pick Up sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp189.700.000,00;
- bb. Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp64.000.000,00;

cc. Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp79.730.000,00

Selain transaksi penambahan dengan pembelian juga melalui transaksi transfer masuk yaitu :

- a. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp372.960.000,00 dari Pusat Perpustakaan Pertanian;
- b. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp300.000.000,00 dari PSE KP berdasarkan BAST No. 788/PL.310/A.9/7/2011 tanggal 22 Juni 2017

Mutasi Transaksi keluar berupa :

- a. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp172.000.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke BPTP NAD berdasarkan BAST nomor B-461.3/PL.310/H.12/2/2017 tanggal 28 Februari 2017
- b. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp409.000.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke PSE KP berdasarkan BAST nomor B-738.1/PL.310/H.12/04/2017 tanggal 20 April 2017
- c. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp407.000.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke Badan Litbang Pertanian berdasarkan BAST nomor B-737.1/PL.310/H.12/04/2017 tanggal 20 April 2017
- d. Note Book sebanyak 1 unit senilai Rp18.640.000, printer sebanyak 1 unit senilai Rp4.575.000,00 dan laptop sebanyak 1 unit senilai Rp16.500.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke PSE KP berdasarkan BAST nomor B-346/PL.310/H.12/02/2017 tanggal 13 Pebruari 2017
- e. Laptop sebanyak 33 unit dari Balai Besar Pengkajian ke 33 BPTP/LPTP.
- f. Mic Conference sebanyak 14 buah senilai Rp75.460.000,00; Audio Conference sebanyak 1 buah senilai Rp7.150.000,00; Power Supply Microphone sebanyak 1 buah senilai Rp23.100.000; Kabel roll sebanyak 2 buah senilai Rp1.265.000,00; PC Unit sebanyak 1 buah senilai Rp14.850.000,00; AC Split sebanyak 5 buah senilai Rp24.750.000,00; Meja Rapat sebanyak 15 buah senilai Rp23.100.000,00; Kursi Besi sebanyak 30 buah senilai Rp21.450.000,00; dan sice sebanyak 2 buah senilai Rp12.100.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke Puslitbangbun berdasarkan BAST Nomor B-2551.1/PL.310/H.12/12/17 tanggal 27 Desember 2017

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp13.222.624.000*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp13.222.624.000,00 dan Rp10.956.768.273,00. Terjadi kenaikan/mutasi tambah pada gedung dan bangunan karena adanya

pengadaan renovasi gazebo dan pembangunan gapura kawasan TSP yaitu sebesar Rp551.200.000,00, selain itu adanya koreksi nilai tim penertiban aset terhadap gedung dan bangunan yang menyebabkan adanya perubahan nilai berupa mutasi tambah dan mutasi kurang pada gedung dan bangunan Balai Besar Pengkajian, seperti tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasi Inventarisasi dan Penilaian Nomor BAR-117/WKN.08/KNL.03/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>10.956.768.273</b>
Mutasi tambah:	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.086.611.858
Bangunan Oceanarium/Observation Lainnya	28.770.400
Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	33.736.552
Bangunan Lainnya	551.200.000
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	113.089.600
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	345.528.080
Mutasi kurang:	-
Bangunan Gedung Kantor Permanen	(1.645.614.858)
Bangunan Oceanarium/Observation Lainnya	(26.169.400)
Gedung Pos Jaga Permanen	(17.875.300)
Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	(47.311.625)
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	(110.868.600)
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	(45.240.980)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>13.222.624.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(166.889.440)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>13.055.734.560</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp1.120.892.300*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.120.892.300,00 dan Rp967.757.300,00. Terdapat kenaikan karena adanya koreksi nilai tim penertiban aset terhadap Jalan dan Jembatan yang menyebabkan adanya perubahan nilai berupa mutasi tambah dan mutasi kurang pada Jalan dan Jembatan Balai Besar Pengkajian, seperti tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasi Inventarisasi dan Penilaian Nomor BAR-117/WKN.08/KNL.03/2017 tanggal 12 Oktober 2017

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>967.757.300</b>
Mutasi tambah:	
Jalan Khusus Komplek	694.564.000
Penambahan nilai jaringan	
Mutasi kurang:	-
Jalan Khusus Komplek	(541.429.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>1.120.892.300</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(770.511.998)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>350.380.302</b>

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp324.157.790*

### C.18 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp324.157.790,00 dan Rp299.165.290,00. Terjadi kenaikan aset tetap lainnya karena pengadaan buku perpustakaan pada tahun 2017. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>299.165.290,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	24.992.500,00
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>324.157.790,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>324.157.790,00</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp0*

### C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada tahun 2017 di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian tidak mempunyai alokasi dana untuk transaksi konstruksi dalam pengerjaan.

**Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap**

**Rp—  
11.051.295.684**

**C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-11.051.295.684,00 dan Rp-11.305.489.926,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
31 Desember 2017*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	13.060.096.131,00	-10.113.894.246,00	2.946.201.885,00
2	Gedung dan Bangunan	13.222.624.000,00	-166.889.440,00	13.055.734.560,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.120.892.300,00	-770.511.998,00	350.380.302,00
4	Aset Tetap Lainnya	324.157.790,00	0	324.157.790,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>27.727.770.221,00</b>	<b>-11.051.295.684,00</b>	<b>16.676.474.537,00</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Aset Tak  
Berwujud Rp00**

**C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian tidak mempunyai aset tak berwujud.

**Aset Lain-Lain  
Rp45.200.000**

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp45.200.000 dan Rp45.200.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:



<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>45.200.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>45.200.000</b>
Akumulasi Penyusutan	(45.200.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0*

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 1 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-45.200.000,00 dan Rp-45.200.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	45.200.000,00	-45.200.000,00	0,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>45.200.000,00</b>	<b>-45.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN Rp500.000.000*

### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

### C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp39.357.781,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada pihak ketiga merupakan dana tunjangan kinerja yang belum disetorkan kepada BPTP. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang kepada Pihak ketiga lainnya		
<b>Total</b>	<b>-</b>	

Pendapatan Diterima di Muka Rp27.621.000

### C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp27.621.000,00 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yaitu ATM BNI dan ATM BRI selama 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Nilai Kontrak	Mulai Kontrak	Akhir Kontrak	Nilai Pendapatan diterima dimuka
ATM BNI	45.000.000	1 Mei 2016	30-Apr-19	20.000.000
ATM BRI	45.198.000	1 Nop 2016	31-Okt-19	27.621.000
<b>Total</b>	<b>90.198.000</b>			<b>47.621.000</b>

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

### C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

#### Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2017
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas*  
*Rp17.018.376.137*

## **C.28 Ekuitas**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp17.018.376.137,00 dan Rp12.910.597.237,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Pendapatan  
PNBP**

**Rp80.794.000**

**D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL  
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp80.794.000,00 dan Rp43.453.000.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

<b>Uraian</b>	<b>31-Des-17</b>	<b>31-Des-16</b>	<b>% Naik / Turun</b>
Pendapatan Jasa Lainnya		26.650.000	-100,0%
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan fungsi masing-masing kementerian lembaga	35.900.000	15.750.000	0,0%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	44.894.000	1.053.000	4163%
<b>Jumlah</b>	<b>80.794.000</b>	<b>43.453.000</b>	<b>85,93%</b>

Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan fungsi masing-masing kementerian lembaga merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah tamu (guest house). Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yaitu sewa tanah dan bangunan perkantoran untuk ATM BNI dan ATM BRI untuk tahun anggaran 2017.

**Beban Pegawai  
Rp8.129.162.625**

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.129.162.625,00 dan Rp8.200.627.176,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah pegawai pada Balai Besar Pengkajian sebanyak 104 orang dengan jumlah eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 3 orang, eselon IV sebanyak 7 orang, jabatan fungsional peneliti 32 orang, penyuluh 10 orang, analis kepegawaian 4 orang, pustakawan 2 orang, pranata humas 2 orang, dan jabatan fungsional umum 43 orang. Jabatan fungsional umum jumlahnya paling banyak dan tersebar di bagian kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, program dan penganggaran, kerjasama, penelitian dan pengkajian.

**Rincian Beban Pegawai**  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	5.299.925.600,00	5.407.342.900,00	-1,99%
Beban Pembulatan Gaji PNS	69.159,00	72.202,00	-4,21%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	358.878.830,00	370.231.690,00	-3,07%
Beban Tunj. Anak PNS	93.390.522,00	95.732.360,00	-2,45%
Beban Tunj. Struktural PNS	96.120.000,00	73.945.000,00	29,99%
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.201.000.000,00	1.097.910.000,00	9,39%
Beban Tunj. PPh PNS	72.614.874,00	145.188.059,00	-49,99%
Beban Tunj. Beras PNS	250.079.640,00	261.634.965,00	-4,42%
Beban Uang Makan PNS	544.091.000,00	524.676.000,00	3,70%
Beban Tunjangan Umum PNS	105.400.000,00	116.610.000,00	-9,61%
Beban Uang Lembur	107.593.000,00	107.284.000,00	0,29%
<b>Jumlah</b>	<b>8.129.162.625,00</b>	<b>8.200.627.176,00</b>	<b>-0,87%</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>			#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>8.129.162.625,00</b>	<b>8.200.627.176,00</b>	<b>-0,87%</b>

*Beban  
Persediaan  
Rp2.137.037.115*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.137.037.115,00 dan Rp1.718.846.182,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan*  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	% Naik / Turun
Beban Persediaan Konsumsi	2.116.009.615,00	1.680.551.882,00	25,91%
Beban Persediaan bahan baku	8.047.500,00	21.393.000,00	-62,38%
Beban persediaan lainnya	12.980.000,00	16.901.300,00	-23,20%
<b>Jumlah</b>	<b>2.137.037.115,00</b>	<b>1.718.846.182,00</b>	<b>24,33%</b>

Beban persediaan digunakan untuk membiayai keperluan barang habis pakai dalam menunjang seluruh kegiatan di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian seperti ATK, Cetakan dan Bahan Pendukung lainnya.

**Beban Barang  
dan Jasa  
Rp7.095.319.826**

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp7.095.319.826,00 dan Rp4.724.972.794,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa  
Per 31 Desember 2017 dan 2016**

<b>Uraian</b>	<b>31-Des-17</b>	<b>31-Des-16</b>	<b>% Naik / Turun</b>
Beban Keperluan Perkantoran	1.395.462.000	1.075.160.000	29,79%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.000.000	45.000.000	0,00%
Beban Honor Operasional Satker	131.400.000	138.900.000	-5,40%
Beban Bahan	2.208.837.300	1.625.107.305	35,92%
Beban Honor Output Kegiatan	451.640.000	456.940.000	-1,16%
Beban Barang NonOperasional Lainnya	805.468.003	35.000.000	0,00%
Beban Langganan Listrik	338.634.886	319.171.744	6,10%
Beban Langganan Telepon	57.121.737	65.775.145	-13,16%
Beban Langganan Air	21.363.900	33.958.600	-37,09%
Beban Jasa Konsultan	66.313.000	-	#DIV/0!
Beban Sewa	177.479.000	18.600.000	854,19%
Beban Jasa Lainnya	22.000.000	20.000.000	10,00%
Beban Jasa Profesi	1.374.600.000	889.050.000	54,61%
Beban Aset Ekstrakomptabel Alsin		2.310.000	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>7.095.319.826</b>	<b>4.724.972.794</b>	<b>-53,00</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>			<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7.095.319.826</b>	<b>4.724.972.794</b>	<b>-53,03</b>

Beban bahan digunakan untuk membiayai fotocopy dan perbanyak dokumentasi serta konsumsi dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja digunakan untuk membiayai honorarium pengelola anggaran yaitu pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, staf pengelola anggaran, petugas SAIBA dan SIMAK BMN. Beban Jasa Profesi digunakan untuk membiayai narasumber sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Beban Jasa Konsultan digunakan untuk Desain Infografis buku TSTPN dan Desain Interior Kantor. Beban Barang Non Operasional Lainnya digunakan untuk membiayai bahan pendukung kegiatan. Beban keperluan kantor digunakan untuk membiayai honor tenaga kontrak seperti pramubakti, satpam dan pengemudi, tenaga dokter, tenaga kontrak S1, pakaian dinas/seragam pegawai, pakaian petugas kebersihan/pramubakti dan pakaian satpam (beserta perlengkapannya). Beban Langganan Air, Listrik dan Telepon

digunakan untuk membiayai operasional air, listrik dan telepon setiap bulannya. Beban penambah daya tahan tubuh digunakan untuk membiayai makanan penambah daya tahan tubuh untuk menunjang kondisi fisik satpam.

**Beban  
Pemeliharaan  
Rp1.694.536.753**

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.,00 dan Rp1.152.600.462,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

<b>Uraian</b>	<b>31-Des-17</b>	<b>30-Des-17</b>	<b>% Naik / Turun</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	576.005.500,00	343.620.000,00	67,63%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	974.239.753,00	773.638.462,00	25,93%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	144.291.500,00	34.842.000,00	314,1%
Beban Persediaan suku cadang		500.000,00	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>1.694.536.753,00</b>	<b>1.152.600.462,00</b>	<b>47,02%</b>

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan halaman gedung. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin digunakan untuk membiayai pemeliharaan infocus, pompa air, mesin potong rumput, faximile, mesin tik manual, perawatan jaringan telepon, interkon dan PABX, perawatan mesin absensi, perawatan peralatan audio system, lemari kayu, pemeliharaan kunci-kunci pintu, lemari dan kardek, printer, personal komputer/notebook, AC Split, genset < 50 KVA, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, peralatan jaringan dan instalasi air bersih/PAM, perawatan jaringan kelistrikan, jaringan LAN, operasional kendaraan bermotor, perpustakaan, tabung pemadam kebakaran, kamera digital dan perlengkapan video, pemeliharaan antena dan server, pemeliharaan CCTV, pemeliharaan dispenser serta pemeliharaan penggantian kain kursi kerja.

**Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp7.222.630.440,00**

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.222.630.440,00 dan Rp7.414.816.272,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian

Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas*  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	5.053.795.440	5.911.916.922,00	-14,52%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	204.140.000,00	136.950.000,00	49,06%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	147.240.000,00	270.528.100,00	-45,57%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.817.455.000,00	1.095.421.250,00	65,91%
<b>Jumlah</b>	<b>7.222.630.440,00</b>	<b>7.414.816.272,00</b>	<b>-2,59%</b>

Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan menunjang kegiatan pada Balai Besar Pengkajian yang dilakukan di luar kantor baik untuk kegiatan pengkajian dan diseminasi maupun kegiatan yang menyangkut administrasi.

*Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Tidak terdapat beban barang yang diserahkan kepada masyarakat di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat*  
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>



**Beban Bantuan Sosial Rp0**

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada terdapat beban bantuan sosial di Balai Besar Pengembangan dan Pengkajian Teknologi Pertanian . Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial*  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	30-Sep-17	31-Des-16	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial			#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial			#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.206.941.663**

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.206.941.663,00 dan Rp1.376.652.625,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31-Des-17	31-Des-17	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.215.862.537,00	1.133.394.210,00	7,28%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	282.813.420,00	231.802.220,00	22,01%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	694.564.000,00		
Beban Penyusutan Jaringan	13.701.706,00	11.456.195,00	19,60%
<b>Jumlah</b>	<b>2.206.941.663,00</b>	<b>1.376.652.625,00</b>	<b>60,31%</b>

**Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0**

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-18.000,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Uraian	30-Sep-17	31-Des-17	% Naik / Turun
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0		0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0,00	-18.000,00	-100,0%
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-100,00%</b>

**Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp-15.166.552**

**D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016*

Uraian	31-Des-17	31-Des-17	% Naik / Turun
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	0,00	9.719.184	-100,00%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	234.152.598,00	32.285.777	0,00%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>234.152.598,00</b>	<b>42.004.961,00</b>	<b>457,44%</b>
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Lainnya	249.319.150,00	3.730.850	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>-15.166.552,00</b>	<b>38.274.111,00</b>	<b>-139,63%</b>

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa  
Rp0

#### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa*  
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Jumlah	0	0	#DIV/0!

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal  
Rp13.589.137.768*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp13.589.137.768,00 dan Rp12.910.597.237,00. Ekuitas awal terdiri dari ekuitas awal di tahun 2016 Rp13.589.137.768,00; surplus/defisit - LO Rp-28.420.000.974,00; koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp4.285.683.238,00; transaksi antar entitas Rp27.563.556.105,00 dan penurunan ekuitas Rp3.429.238.369,00.

*Defisit LO  
Rp-28.420.000.974*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-28.420.000.974,00 dan Rp-24.506.770.400,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

*Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp0*

### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan koreksi atas nilai aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian aset yang terjadi pada periode tahun berjalan. Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00. Nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0*

### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
<b>Jumlah</b>	-

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0*

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

**Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi**

**Rp4.285.683.238**

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.285.683.238,00 dan Rp00,00. Transaksi koreksi nilai aset tetap non revaluasi berasal dari jurnal simak bmn yang berasal dari menu koreksi aset pada SIMAK BMN yang diperoleh dari revaluasi aset tetap berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor BAR-117/WKN.08/KNL.03/2017 tanggal 12 Oktober 2017. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember Tahun 2017*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	3.591.119.238
JUJ	694.564.000
Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.285.683.238</b>

**Koreksi Lain-Lain  
Rp0**

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

**Transaksi Antar  
Entitas  
Rp27.563.556.105**

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp27.563.556.105,00 dan Rp25.225.390.767,00 berasal dari Total Belanja Pegawai dan Belanja Barang (Ditagihkan ke entitas lain – 313111) dikurangi Total Pendapatan (Diterima dari entitas lain – 313121) dikurangi selisih antara transfer keluar dan transfer masuk.

### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	28.662.967.711
Diterima dari Entitas Lain	(128.415.000)
Transfer Masuk	357.325.716
Transfer Keluar	(1.328.322.322)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>27.563.556.105</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017 DDEL sebesar Rp128.415.000 yaitu dari pendapatan bukan pajak yang berasal dari sewa tanah dan bangunan pemerintahan yaitu ATM BNI dan ATM BRI, sewa ruangan dan sewa mess, sedangkan DKEL sebesar Rp28.662.967.711,00 yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp357.325.726,00 yang terdiri dari :

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin Minibus	Pusat perpustakaan pertanian dan PSE KP	672.960.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-315.634.284,00
<b>Jumlah</b>			<b>357.325.716,00</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp-1.328.322.322,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2017.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin		1.687.200.000,00
	Minibus	BPTP NAD, PSE KP dan Balitbangtan	
	Note book	PSE KP	
	Laptop	33 BPTP	
	Mic Conference, Audio Conference, Power Supply	Puslitbangbun	
	Microphone, Kabel roll, PC Unit, AC Split, Meja Rapat, Kursi Besi dan Sice		
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Puslitbangbun	
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-358.877.678,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.328.322.322,00</b>

*Ekuitas Akhir*  
Rp17.018.376.137

**E.5 Ekuitas Akhir**

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp17.018.376.137,00 dan Rp13.589.137.768,00.

## **A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada tahun 2017 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian melakukan 3 kali revisi DIPA dan 6 kali revisi POK, antara lain :

1. Revisi DIPA pertama tanggal 16 Mei 2017 dilakukan karena adanya pengalihan anggaran pada satker Balai Besar Pengkajian untuk kegiatan Gerakan Tanam Cabai pada seluruh BPTP,
2. Revisi DIPA kedua tanggal 21 Juli 2017 dilakukan karena adanya perubahan akun pada kegiatan Pembangunan Taman Sains Pertanian dari belanja modal gedung dan bangunan (533111) ke belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (523111),
3. Revisi DIPA ketiga tanggal 16 Agustus 2017 karena adanya penambahan anggaran APBNP untuk kegiatan perbenihan,
4. Revisi DIPA ke empat tanggal 7 Nopember 2017 karena Efisiensi belanja dan pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan belanja bahan dan perjalanan,
5. Revisi DIPA ke lima tanggal 30 Nopember 2017 karena Pergeseran pagu anggaran untuk pemenuhan dan Penyesuaian pagu anggaran untuk menutupi kekuarangan gaji dan tunjangan di BPTP,
6. Revisi DIPA ke enam tanggal 13 Desember 2017 karena adanya pergeseran anggaran ke belanja perjalanan dan revisi DIPA ke tujuh tanggal 29 Desember 2017 karena pergeseran anggaran yang disebabkan pagu minus.

Terjadi transfer masuk BMN pada tahun 2017 yaitu :

- a. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp372.960.000,00 dari Pusat Perpustakaan Pertanian;
- b. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp300.000.000,00 dari PSE KP berdasarkan BAST No. 788/PL.310/A.9/7/2011 tanggal 22 Juni 2017

Mutasi Transaksi keluar BMN berupa :

- a. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp172.000.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke BPTP NAD berdasarkan BAST nomor B-461.3/PL.310/H.12/2/2017 tanggal 28 Februari 2017
- b. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp409.000.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke PSE KP berdasarkan BAST nomor B-738.1/PL.310/H.12/04/2017 tanggal 20 April 2017
- c. Minibus sebanyak 1 unit senilai Rp407.000.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke Badan Litbang Pertanian berdasarkan BAST nomor B-737.1/PL.310/H.12/04/2017 tanggal 20 April 2017
- d. Note Book sebanyak 1 unit senilai Rp18.640.000, printer sebanyak 1 unit senilai Rp4.575.000,00 dan laptop sebanyak 1 unit senilai Rp16.500.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke PSE KP berdasarkan BAST nomor B-346/PL.310/H.12/02/2017 tanggal 13 Pebruari 2017



- e. Laptop sebanyak 33 unit dari Balai Besar Pengkajian ke 33 BPTP/LPTP.
- f. Mic Conference sebanyak 14 buah senilai Rp75.460.000,00; Audio Conference sebanyak 1 buah senilai Rp7.150.000,00; Power Supply Microphone sebanyak 1 buah senilai Rp23.100.000,00; Kabel roll sebanyak 2 buah senilai Rp1.265.000,00; PC Unit sebanyak 1 buah senilai Rp14.850.000,00; AC Split sebanyak 5 buah senilai Rp24.750.000,00; Meja Rapat sebanyak 15 buah senilai Rp23.100.000,00; Kursi Besi sebanyak 30 buah senilai Rp21.450.000,00; dan sice sebanyak 2 buah senilai Rp12.100.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke Puslitbangbun berdasarkan BAST Nomor B-2551.1/PL.310/H.12/17 tanggal 27 Desember 2017
- g. Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp118.340.000,00 dari Balai Besar Pengkajian ke Puslitbangbun berdasarkan BAST Nomor B-2551.2/PL.310/H.12/17 tanggal 27 Desember 2017

Pada tahun 2017 terdapat kesalahan pembebanan akun pada pengadaan aset tetap renovasi yaitu renovasi gedung dan bangunan milik Puslitbangbun seharusnya menggunakan akun 536111 sementara di Balai Besar Pengkajian menggunakan akun 533121 dan sudah di lakukan jurnal akibat kesalahan tersebut yang dilengkapi dengan memo penyesuaian.

## F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Terdapat kegiatan kerjasama antara Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yaitu :

No	Nama Kegiatan	Nomor Kontrak	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendampingan, Monitoring, Evaluasi Kerjasama Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Strategis	86.8/PL.040/H.1/05/2017.K	399.750.000	397.505.627	99,44%
2.	Model Pertanian Bio Industri berbasis integrasi sawit-sapi di Kab. Lamandau Kalimantan Tengah	90.9/HM.230/H.1/05/2017.k	214.945.000	214.752.121	99,91%
3.	Percepatan Sertifikasi Kebun Percobaan Lingkup Badan Litbang Pertanian	86.7/PL.040/H.1/05/2017.K	625.100.000	622.572.539	99,60%
4.	Percepatan Diseminasi Teknologi Perbenihan Kedelai Mendukung Peningkatan Produksi Kedelai Nasional	166.1/PL.040/H.1/08/2017.k	1.000.000.000	999.833.421	99,98%
5.	Rancangan Model Pengembangan Sistem Usaha Pertanian (SUP) Inovatif pada Lahan Kering di Wilayah Perbatasan	129/HM.230/H.1/07/2017.k	427.975.000	427.347.350	99,85%
6.	Penyusunan Prioritas Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan	129.3/HM.230/H.1/07/2017.k	390.000.000	389.271.000	99,81%
Jumlah			3.057.770.000	3.051.282.058	99,79%

